

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Sudan Selatan merupakan kawasan yang strategis bagi kepentingan geopolitik dan geoekonomi Tiongkok mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh negara tersebut. Kehadiran Tiongkok di Sudan Selatan sejak tahun 1996 telah menandai bahwa Sudan Selatan merupakan mitra strategis bagi Tiongkok di kawasan Afrika. Proses penyelesaian konflik di Sudan Selatan telah dilakukan oleh beberapa pihak. IGAD yang merupakan blok regional kawasan Afrika Timur menjadi mediator utama dalam proses penyelesaian konflik. Proses penyelesaian konflik berakhir anti-klimaks pada tahun 2016 ketika perjanjian ARCSS yang telah disepakati oleh kedua pihak tidak menghentikan pertikaian antara SPLM/A dengan SPLM/A-IO. Upaya revitalisasi perjanjian ARCSS dilakukan oleh IGAD beserta anggota IGAD-PLUS dengan menyelenggarakan berbagai agenda yang mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik. IGAD juga membentuk mekanisme pengawasan perjanjian ARCSS yang disebut sebagai CTSAMVM dan RJMEC. Upaya tersebut pada akhirnya mencapai titik temu pada tahun 2018 dimana pihak SPLM/A dan SPLM/A-IO menandatangani perjanjian damai dengan kesepakatan pembagian kekuasaan. Meskipun perjanjian ini masih dipandang skeptis oleh beberapa pihak.

Pada bab II dari tulisan ini penulis mencoba melihat hubungan antara karakteristik *quasi-mediation* dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Dalam hal ini penulis berhasil membuktikan bahwa Tiongkok menggunakan *quasi-mediation* dalam melakukan mediasi di Sudan Selatan. Hal ini

dapat dilihat dari beberapa aspek yang dilakukan oleh Tiongkok. *Pertama*, kepentingan komersial menjadi pendorong utama Tiongkok dalam proses mediasi, beberapa perusahaan multi-nasional Tiongkok melakukan investasi besar pada Sudan Selatan. CNPC adalah aktor utama dari investasi Migas Tiongkok di Sudan Selatan dengan kepemilikan saham mencapai 40%. Kepentingan komersial lain dari Tiongkok bertumpu pada sektor telekomunikasi dan pembangunan infrastruktur.

Kedua, dalam proses penyelesaian konflik Tiongkok lebih bersifat ‘partisipatif’ dan ‘mengikuti’ jalannya penyelesaian konflik ketimbang ‘mendominasi’ dan ‘memimpin’ jalannya mediasi. Hal ini terlihat dari peran Tiongkok yang berlandung dibalik slogan “solusi Afrika untuk masalah Afrika”. Peran Tiongkok dalam penyelesaian konflik juga berada dibalik IGAD dengan hanya menjadi anggota dari mekanisme pengawasan perjanjian ARCSS yang dibentuk oleh IGAD. *Ketiga*, Tiongkok juga lebih memberikan ide-ide konstruktif untuk mencapai de-eskalasi konflik. Hal ini terlihat dari beberapa inisiatif Tiongkok untuk melakukan agenda konsultasi serta memberikan saran mengenai pemberhentian permusuhan dan mendorong proses rekonsiliasi. Dalam hal ini penulis melihat bahwa upaya Tiongkok untuk memediasi Sudan Selatan bukanlah dalam rangka menciptakan stabilitas sosial bagi warga Sudan Selatan, melainkan dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi untuk Tiongkok sendiri.

Pada bab selanjutnya penulis mencoba untuk mengidentifikasi mengenai alasan dari Tiongkok untuk memediasi konflik di Sudan Selatan. Beberapa temuan yang penulis dapatkan bermuara pada kepentingan ekonomi Tiongkok. Berbeda dengan bab sebelumnya, hasil dari temuan bab III lebih mengacu untuk melihat tentang bagaimana kepentingan komersial mampu mendorong upaya mediasi

Tiongkok. Dalam hal ini penulis melihat bahwa alasan Tiongkok dalam memediasi Sudan Selatan didasari oleh beberapa faktor, diantaranya ialah Tiongkok memandang Sudan Selatan sebagai kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan. Pada sebelum perang sipil terjadi, Sudan Selatan berkontribusi atas 5% dari kebutuhan ekonomi Tiongkok. Jumlah tersebut terbilang minim jika melihat dari total kebutuhan energi Tiongkok. Namun, Tiongkok melihat potensi yang besar pada Sudan Selatan oleh karena 88% wilayah Sudan Selatan belum di eksplorasi oleh para penambang minyak. Hal ini yang mendorong upaya Tiongkok untuk menjaga investasinya di Sudan Selatan.

Melanjutkan argument diatas, Sudan Selatan juga merupakan kawasan strategis bagi Tiongkok oleh karena minimnya aktor lain dalam iklim investasi Sudan Selatan. Sehingga hal ini memberikan kesempatan yang luas bagi Tiongkok untuk melakukan monopoli dalam perekonomian Sudan Selatan. Alasan lain dari Tiongkok untuk memediasi konflik ialah adanya akses bagi Tiongkok untuk menjalin komunikasi pada kedua pihak yang bertikai. Hal ini dilihat dari bagaimana pihak SPLM/A dan SPLM/A-IO menyambut baik upaya Tiongkok untuk melakukan proses mediasi konflik. Dalam hal lain penulis juga melihat bahwa keterlibatan Tiongkok untuk memediasi Sudan Selatan merupakan dampak dari desakan masyarakat internasional yang menginginkan Tiongkok untuk berperan aktif sebagai ‘kekuatan besar dunia yang bertanggung jawab’. Desakan tersebut muncul pasca munculnya laporan yang mengindikasikan adanya keterlibatan Tiongkok dalam memberikan pasokan senjata pada pemerintah Sudan, yang kemudian digunakan untuk melakukan pembantaian pada rakyatnya. Disamping

itu, keterlibatan aktor-aktor besar dunia dalam memediasi konflik Sudan Selatan juga menjadi pendorong bagi Tiongkok untuk berperan sebagai *quasi-mediator*.

Secara garis besar, proses penyelesaian konflik Tiongkok di Sudan Selatan didorong oleh kepentingan ekonomi dimana Tiongkok ingin memonopoli kegiatan ekonomi di Sudan Selatan. Hal ini yang membuat Tiongkok menggunakan pendekatan *quasi-mediation* untuk mendapatkan kepentingannya tersebut. Dalam hal ini penulis menilai bahwa peran Tiongkok sebagai *quasi-mediator* didasari oleh keinginannya untuk mendapatkan dua kepentingannya secara bersamaan, yaitu kepentingan komersial dan legitimasi politik. Ketidakpedulian Tiongkok mengenai pihak mana yang akan memenangkan konflik juga menjadi faktor lain yang membuktikan posisi Tiongkok sebagai *quasi-mediator*. Hal tersebut disebabkan karena upaya mediasi Tiongkok menekankan pada bagaimana proses mediasi tersebut mampu memberikan dampak positif bagi kepentingan investasi Tiongkok.

Dalam hal lain, penulis merasa bahwa konsep *quasi-mediation* yang ditawarkan oleh Degang Sun dan Yahia Zoubir telah memberikan kerangka yang membantu penulis dalam menganalisis karakteristik mediasi Tiongkok di Sudan Selatan. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi penulis untuk melihat lebih dalam mengenai variabel-variabel yang memengaruhi motivasi Tiongkok dalam memediasi konflik. Meskipun demikian, penulis merasa bahwa konsep ini masih memiliki beberapa limitasi dalam menjelaskan perilaku mediator dalam memediasi konflik serta kaitannya dengan motivasi Tiongkok dalam memediasi konflik Sudan Selatan. Sehingga masih terdapat persinggungan dalam menganalisis mediasi Tiongkok di Sudan Selatan, terutama dalam pembahasan mengenai kepentingan komersial Tiongkok dalam memediasi konflik.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses mediasi konflik Tiongkok di Sudan Selatan, tulisan ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian tentang mengapa Tiongkok bersedia untuk memediasi konflik di Sudan Selatan dengan melihat beberapa indikasi pada bab sebelumnya. Melihat kompleksitas konflik yang terjadi di Sudan Selatan, penulis memiliki beberapa rekomendasi guna melengkapi hasil dari penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Kegagalan ARCSS pada tahun 2015 merupakan suatu pukulan bagi IGAD dan juga anggota dari IGAD-PLUS, terlebih lagi perjanjian revitalisasi ARCSS juga dipandang skeptis akan memberikan perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karenanya penulis merasa perlu ada pembahasan mendalam mengenai kegagalan ARCSS pada tahun 2015 dan potensi implementasi R-ARCSS tahun 2018.
2. Salah satu kegagalan ARCSS ialah adanya perbedaan tujuan antara para anggota dari IGAD. Situasi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai proses regionalisasi pembentukan IGAD dan posisi para anggotanya.
3. Penelitian Merics pada 2018 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan mengenai upaya Tiongkok untuk memediasi konflik di berbagai kawasan. Pembahasan mengenai pola mediasi Tiongkok di kawasan lain merupakan hal yang menarik untuk dikaji, serta penggunaan *quasi-mediation* dalam proses mediasinya.